

PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR  
( MOBIL ) DITINJAU DARI PASAL 480 AYAT 1 DAN 2 KUHP

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “ Veteran” Jawa Timur



Oleh :

RIEZKY ARIEAWAN RINALDI

NPM : 0771010093

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIDKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2012

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR  
( MOBIL ) DITINJAU DARI PASAL 480 AYAT 1 DAN 2 KUHP

Disusun oleh :

RIEZKY ARIEAWAN RINALDI  
NPM. 0771010093

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal : 16 Juni 2012

Tim Penguji :

Tanda Tangan

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. <u>H. Sutrisno, SH. M.Hum.</u><br>NIP. 19601212 198803 1 001        | : (.....) |
| 2. <u>Subani S.H M.Si.</u><br>NIP. 195105041983031001                  | : (.....) |
| 3. <u>Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM.</u><br>NIP. 19620625 199103 1 001 | : (.....) |

Mengetahui,  
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro.S.H.,MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN  
KENDARAAN BERMOTOR ( MOBIL ) DARI HASIL PENCURIAN  
DITINJAU DARI PASAL 480 AYAT 1 DAN 2 KUHP

Disusun oleh :

RIEZKY ARIEAWAN RINALDI  
NPM : 0771010093

Telah Disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Mengetahui,  
DEKAN,

Pembimbing Utama

Haryo Sulistiyantoro,SH.,MM  
NIP. 19 510 554 198303 1001

Haryo Sulistiyantoro,SH.,MM  
NIP. 19 510 554 198303 1001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR  
( MOBIL ) DITINJAU DARI PASAL 480 AYAT 1 DAN 2 KUHP

Oleh:

RIEZKY ARIEAWAN RINALDI  
NPM. 0771010093

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pada tanggal 22 Juni 2012

Pembimbing Utama:

Tim Penguji :

1.

Hariyo Sulistiyantoro, S.H, MM  
NIP. 195105041983031001

Sutrisno S.H M.Hum  
NIP. 19601212198031001

2.

Subani S.H M.Si  
NIP. 195105041983031001

3.

Hariyo Sulistiyantoro, S.H, MM  
NIP. 195105041983031001

Mengetahui :

DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H, MM  
NIP.196206251991031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riezky Arieawan Rinaldi  
Tempat/ Tanggal Lahir : Madiun, 23 / Maret / 1989  
NPM : 0771010093  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Desa Wonoayu, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

“PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) DARI HASIL PENCURIAN DITINJAU DARI PASAL 480 AYAT 1 DAN 2 KUHP” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan ( plagiat ).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan ( Plagiat ) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Kesarjanaan ( Sarjana Hukum ) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui  
PEMBIMBING UTAMA

Surabaya, 13 Juni 2012  
PENULIS

Hariyo Sulistiyantoro,SH.,MM  
NIP. 19 510 554 198303 1001

Riezky Arieawan Rinaldi  
NPM. 0771010093

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberi rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

“PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) DARI HASIL PENCURIAN DITINJAU DARI PASAL 480 AYAT 1 DAN 2 KUHP ”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak dapat lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro , SH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan selama mengerjakan skripsi.
2. Bapak Sutrisno, SH., Mhum., selaku Wadep I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. EC. Gendut Soekarno, M.S., selaku wadep II Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, SH., M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum dan yang selalu memberikan ilmu serta nasehatnya kepada peneliti selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Sariyanto, S.Sos., Bapak Tauhid dan segenap pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

7. Kedua Orang Tua, Hadi Mulyono SH., MM, Ayahku dan Boedi Sunaryanti, SH. Ibuku yang telah membiayai dan selalu memberi semangat dan curahan kasih sayang tanpa henti, serta Achmad Fawzi Abdillah adik saya yang selalu memberi semangat kepada saya.
8. Teman-teman seperjuangan saya yang telah menjadi saudaraku selama kuliah di sini.

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penuh keterbatasan. Dengan harapan bahwa skripsi ini Insya Allah akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum, maka saran dan kritik yang membangun sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Surabaya, 20 Juni 2012

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama : Riezky Arieawan Rinaldi  
Npm : 0771010093  
Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 23 Maret 1989  
Program Studi : Pidana  
Judul Skripsi :

PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN  
BERMOTOR (MOBIL) DARI HASIL PENCURIAN DITINJAU DARI  
PASAL 480 AYAT 1 DAN 2 KUHP

#### ABSTRAKSI

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan mobil serta Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan mobil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sumber data diperoleh dari literatur, Undang-undang dan wawancara terhadap penyidik di Polres Sidoarjo, analisa data yang digunakan menggunakan data deskriptif analisis yaitu mengkaji fakta sosial yang timbul di masyarakat, Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hokum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Yang mana kasus tersebut diatur didalam pasal 480 ayat 1 dan 2 KUHP. hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, dimana hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan juga korban agar nilai-nilai hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Kata kunci: Kasus penadahan, kendaraan bermotor, tindak pidana.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Nama : Riezky Arieawan Rinaldi  
Npm : 0771010093  
Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 23 Maret 1989  
Program Studi : Pidana  
Judul Skripsi :

PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR  
(MOBIL) DARI HASIL PENCURIAN DITINJAU DARI PASAL 480 AYAT 1  
DAN 2 KUHP

**ABSTRACT**

This study aims to determine how a review of criminal law against the criminal fencing and car To find the factors into consideration what the judges hearing criminal fencing in the car. This study uses normative legal research methods, data sources obtained from the literature, laws and interviews with investigators in Sidoarjo district police, which used data analysis using descriptive data analysis examines the social facts that arise in society, descriptive, covering the content and structure of the law positive is an activity undertaken by the authors to determine the content and meaning of the rule of law is used as reference in resolving legal issues that become the object of study. In which case it is set in Article 480 paragraphs 1 and 2 of the Criminal Code. judges must explore, follow and understand the values and sense of justice which the law of life in society, where the judge before dropping a decision must consider the sense of justice for the accused and the victim to legal values can be run in accordance with its purpose.

**Key words:** The case of fencing, motor vehicle, a felony.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
ABSTRAKSI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Lokasi Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	7
1.6 Pengertian Tindak Pidana .....	8
1.7 Pengertian Tindak Pidana Penadahan .....	10
1.8 Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Sebagai Kebiasaan.....	16
1.9 Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Positif.....	18
1.10 Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam....	19
1.11 Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga atau Rumah Tangga atas Delik Aduan .....	21
1.12 Pengertian Kendaraan Bermotor (Mobil, Sepeda Motor, Dll) .....	22

1.13 Metode Penelitian.....	23
1.13.1 Jenis Penelitian .....	23
1.13.2 Sumber Data .....	24
1.13.3 Metode Pengumpulan Data.....	25
1.13.4 Metode Pengolahan Data Atau Analisis Data .....	25
1.13.5 Sistematika Penulisan .....	26

## BAB II TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

### PENADAHAN MOBIL DARI HASIL PENCURIAN..... 28

2.1 Modus Operandi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Penadahan Mobil Dari Hasil Pencurian.....	28
2.2 Tinjauan Hukum Bagi Si Pelaku Penadah Mobil Hasil Pencurian .	31
2.2.1 Pengertian Pelaku.....	35
2.2.2 Bentuk-bentuk Pelaku.....	36
2.2.3 Kasus Posisi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Mobil.....	38
2.2.4 Analisis Kasus Posisi Tindak Pidana Penadahan Mobil.....	40

## BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN

### HAKIM DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA

### PENADAHAN MOBIL DARI HASIL PENCURIAN ..... 41

3.1 Faktor-faktor Yang Meringankan Dan Memberatkan Pelaku Tindak Pidana Penadahan Mobil Hasil Pencurian .....	41
3.2 Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak pidana Penadahan Mobil Dari Hasil Pencurian.....	46

BAB IV PENUTUP .....	51
4.1 Kesimpulan .....	51
4.2 Saran.....	52

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia umumnya dan krisis moral masyarakat khususnya membawa dampak dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan baik yang dilakukan oleh para pejabat maupun yang dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai modus sangat dirasakan dan meresahkan tatanan kehidupan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi yang menjadikan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, sehingga ada suatu anggapan masyarakat yang menyatakan “mencari uang yang haram saja susah apalagi yang halal”. Kondisi yang demikian terutama bagi masyarakat yang pemahaman tentang agama kurang mengambil jalan pintas yaitu mengambil langkah untuk melakukan kejahatan, yaitu dengan berbagai macam modus yang penting dapat berhasil dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk foya-foya maupun memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka

(machstaat), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum.

Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Di dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan.

Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjambratan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau “street crime” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan.

Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju.

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perlaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa

kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang berasal dari hasil pencurian.

Berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang, selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan.<sup>1</sup>

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah di antaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya.

Selain itu juga semakin maraknya penjualan bagian-bagian (onderdil) kendaraan bermotor bekas oleh para pedagang kaki lima, yang tidak menutup kemungkinan onderdil kendaraan tersebut didapatkan oleh pedagang dari para pelaku

---

<sup>1</sup> Soerjono Sokanto, Hartono dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Penerbit : Aksara, 1988, Jakarta, hal. 20.



curanmor, untuk itu perlu dilakukan penyelidikan terhadap para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan bermotor bekas tersebut.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sring dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan. Unsur kesengajaan atau culpa ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu si pelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau penipuan.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tindak pidana penadahan dengan mengambil judul : PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR ( MOBIL ) DARI HASIL PENCURIAN DITINJAU DARI PASAL 480 AYAT 1 DAN 2 KUHP.

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 61

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan mobil dari hasil pencurian ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan mobil ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan mobil ?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan mobil ?

## 1.4 Lokasi Penelitian

Penulis menyusun penelitian skripsi yang berjudul tentang Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Mobil) Dari Hasil Pencurian Ditinjau Dari Pasal 480 ayat 1 dan 2 KUHP ini berlokasi di Polres Sidoarjo.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi pasti ada manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi tersebut. Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis.

### 1. Manfaat teoritis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana penadahan mobil.

### 2. Manfaat praktis

“ Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum di bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana penadahan mobil. Dengan mengetahui faktor-faktor pendorong dari dilakukannya tindak pidana penadahan mobil, maka penegak hukum dan masyarakat dapat mengambil langkah penanggulangan yang tepat untuk menangani apabila timbul suatu tindak pidana

## 1.6 Pengertian Tindak Pidana

Pada umumnya untuk suatu kejahatan diisyaratkan bahwa kehendak pelaku ditujukan terhadap perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan hukuman. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupapidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan, bulkannya kejadian itu.<sup>3</sup>

Menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.

Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Dengan batasan seperti ini, maka menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>4</sup>

Maka dari itu, para pelaku tindak pidana harus berpikir dua kali untuk melakukan tindakannya, karena di negara ini hukum itu berlaku. Dan hukum harus ditaati oleh masyarakat. Hukum mempunyai kekuasaan hukum. Apabila tidak, maka peraturan itu berupa kekuatan , sebab hanya merupakan paksaan semata-mata.<sup>5</sup>

Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>4</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hal 105

<sup>5</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 66

- c. “Menentukan dengan cara bagaimana penanganan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.<sup>10</sup>

Hukum pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri – ciri atau sifat – sifatnya yang khas.

### 1.7 Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Menurut Code Penal Perancis, yakni sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan, yakni dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-bendayang diperoleh karena kejahatan.

Menurut Satochid Kartanegara dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* yang ditulis oleh P.A.F. Lamintang, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.<sup>6</sup>

Unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana penadahan biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 480 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana penadahan dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 481 KUHP.

Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

---

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang, Theo lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 362

1) Yang disebut unsur obyektif ialah:

a) Perbuatan manusia.

Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif. Namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur obyektif tetapi juga pada unsur subjektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur obyektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan. Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak penting artinya. Dari rentetan akibat yang timbul dari kelakuan tidak ada yang menjadi inti tindak pidana, kecuali yang telah dirumuskan dalam istilah yang telah dipakai untuk merumuskan kelakuan tersebut. Misalnya kelakuan dalam tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP, dirumuskan dengan istilah mengambil barang yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, hal itu tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana penadahan.

b) Delik materiil.

Delik materiil dimana dalam perumusannya tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila kita jumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, harus menggunakan ajaran hubungan kausal, untuk menggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu. Dengan begitu baru dapat diketahui

perbuatan materiil dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa diketahui siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu, tidak dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.

c) Delik formil.

Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang sedang akibatnya yang dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.

2) Yang disebut unsur subyektif ialah :

a) Dilakukan dengan kesalahan.

Delik yang mengandung unsur memberatkan pidana, apabila pelaku penadahan itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada pasal 481 ayat 1, 2, 3 dan 4 KUHP. Maka pelaku penadahan ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam pasal 336 KUHP yang berbunyi; Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yangmg diterangkan dalam pasal 480dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut .

b) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut pengertian Simons yang dikutip dalam bukunya Sudarto tentang



adanya unsur-unsur pada tindak pidana apabila : “perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan, dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

Pengertian kemampuan bertanggung jawab, banyak yang telah mengemukakan pendapat antara lain Simons berpendapat bahwa : “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP terdiri atas :

- a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari :
  1. Yang ia ketahui atau waarvan hij weet
  2. Yang secara patut harus dapat ia duga atau warn hij redelijkerwijs moet vermoeden
- b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :
  1. Kopen atau membeli
  2. Buren atau menyewa
  3. Inruilen atau menukar
  4. In pand nemen atau menggadai
  5. Als geschenk aannemen atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian
  6. Uit winstbejag atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
  7. Verkopen atau menjual
  8. Verhuren atau menyewakan
  9. In pand geven atau menggadaikan

10. Vervoeren atau mengangkut
11. Bewaren atau menyimpan dan
12. Verbergen atau menyembunyikan.<sup>7</sup>

Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur *waarvan hij weet* atau yang ia ketahui.<sup>8</sup>

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan.

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus* dan unsur ketidaksengajaan atau unsur *culpa* atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 364

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 365

melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP.

Di samping itu pula unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 ayat 2 KUHP terdiri dari :

- a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari :
  1. Yang ia ketahui
  2. Yang secara patut harus dapat diduga
- b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :
  1. Barangsiapa
  2. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda
  3. Yang diperoleh karena kejahatan.<sup>9</sup>

Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika benda tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh karena kejahatan itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan, bahkan juga jika benda itu telah dibudidayakan, ditenakkan, dan lain-lainnya.

Bahwa kejahatan terhadap harta benda, khususnya perampokan bersenjata akan meningkat. Juga pencurian mobil, karena mobil merupakan lambang dunia industri modern.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 383

<sup>10</sup> J.E. Sahetapy, B. Mardjono Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta, hal 97

### 1.8 Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Sebagai Kebiasaan

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 481 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa yang membuat sebagai kebiasaan pekerjaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau, menyembunyikan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan, dipidana dengan dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
2. Orang yang bersalah dapat dicabut hak-haknya dan dapat dicabut pula haknya untuk melakukan pekerjaan, dalam pekerjaannya kejahatan itu telah dilakukan.<sup>11</sup>

Jika membandingkan perbuatan-perbuatan yang dilarang didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal ayat (1) KUHP dengan perbuatan yang terlarang di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 480 ayat 1 KUHP, dapat diketahui bahwa antara keduanya tidak terdapat perbedaan sama sekali, tetapi jika kemudian orang melihat pada pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP, maka segera juga dapat diketahui bahwa pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP adalah lebih berat daripada yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa perbuatan melakukan sebagai kebiasaan itu merupakan unsur yang memberatkan pidana dalam tindak pidana penadahan. Tentang apa sebabnya pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam

---

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, Theo lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 389

Pasal 481 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana yang lebih berat dari pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP yakni, karena tindak pidana penadahan yang dimaksud dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP telah dilakukan oleh pelaku sebagai kebiasaan.

Tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP sebenarnya sama dengan tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, tetapi didalamnya terdapat unsure yang memberatkan pidana, maka tindak pidana tersebut didalam doktrin juga sering disebut sebagai tindak pidana penadahan dengan kualifikasi atau *gequalificeerde heling*.

Unsur subjektif dari tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud didalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP ialah unsure dengan sengaja atau unsur *opzettelijk*.

Ditinjau dari unsur dengan sengaja tersebut didalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur Pasal 481 ayat 1 KUHP, diketahui bahwa unsur dengan sengaja oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan didepan unsur-unsur objektif: membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, menyembunyikan, dan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan, sehingga karena unsur-unsur objektif diatas terletak dibelakang unsur dengan sengaja, maka unsur-unsur objektif itu sudah

jasas merupakan unsur-unsur yang oleh undang-undang yang telah disyaratkan sebagai harus diliputi oleh unsure kesengajaan dari pelaku.<sup>12</sup>

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undang didalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur Pasal 481 ayat 1 KUHP, penuntut umum dan hakim harus dapat membuktikan di depan siding pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut,bahwa terdakwa:

- a.Menghendaki untuk melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, dan harus merupakan salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan: membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan;
- b.Mengetahui tentang keadaan benda-benda yang ia beli, tukar, dan lain-lainnya itu sebagai benda-benda yan diperoleh karena kejahatan;<sup>13</sup>

#### 1.9 Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Positif

Pencurian adalah mengambil barang orang lain untuk memilikinya.Tindak pidana ini diatur oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai : mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.<sup>14</sup>

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

1. Unsur subjektif :  
dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
2. Unsur objektif :
  - a. Barangsiaapa
  - b. Mengambil

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, Theo lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 390

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 391

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 14

- c. Sesuatu benda
- d. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>15</sup>

Agar seorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan Pasal 362 KUHP.

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

Kesengajaan atau opzet pelaku itu meliputi unsur-unsur:

1. Mengambil,
2. Sesuatu benda,
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

#### 1.10 Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam

Pengertian pencurian secara Etimologis yaitu, pencurian asal kata dari saraqah yasriq-saraqah. Wa sariqan wa saraqatan, wa sariqatan wa sirqatan, yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan.

---

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, Theo lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 2

Ulama mengkategorikan pencurian kepada 2 macam yaitu, pencurian yang diancam dengan hukuman ta`zir adalah pencurian yang tidak terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman Had. Ulama juga mengkategorikan pencurian yang diancam dengan hukuman Had, kepada 2 bagian yaitu pencurian kecil dan pencurian besar.<sup>16</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pencurian kecil secara terminologis adalah menurut Abd al Qadir Audah pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, sedangkan menurut al Sayid Sabiq yaitu, pencurian kecil yaitu pencurian yang wajib divonis dengan potongan tangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pencurian besar secara terminologis menurut Abd al Qadir Audah dan Al Sayid Sabiq yaitu mengambil harta orang lain dengan kekerasan dan ini disebut juga dengan merampok atau begal.

Seorang pencuri ketika meniatkan perbuatannya, maka sebenarnya ia menginginkan agar usahanya ( kekayaan ) ditambah dengan kekayaan orang lain, dan ia meremehkan usaha-usaha halal. Ia tidak mencukupkan dengan hasil usahanya sendiri, melainkan mengharapkan hasil usaha orang lain, agar dengan demikian ia bertambah daya nafkahnya atau tidak bersusah-susah bekerja atau dapat terjamin hari depannya. Dengan perkataan lain, tambahnya usaha atau kekayaan itulah yang menjadi faktor pendorong adanya tindak pidana pencurian.

---

<sup>16</sup> Mardani, *Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 15, April 2008, Hal 240



### 1.11 Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga atau Rumah Tangga atas Delik Aduan.

Tindak pidana pencurian dalam keluarga atau rumah tangga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi :

- (1).jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan yang diatur dalam bab ini ialah seorang suami istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang membantu melakukan kejahatan tersebut.
- (2).jika mereka itu merupakan suami istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.
- (3).jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.<sup>17</sup>

Delik-delik aduan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 367 ayat (2) dan ayat

(3) KUHP itu merupakan *relatieve klacht delicten* atau delik-delik aduan relative, yakni delik-delik yang adanya suatu pengaduan itu hanya merupakan suatu *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau hanya merupakan suatu syarat agar terhadap pelaku-pelakunya dapat dilakukan penuntutan,<sup>18</sup>

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, Theo lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 63

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 65

Apabila suami atau istri tidak dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, maka menurut Pasal 367 ayat (1), sama sekali tidak boleh dilakukan penuntutan.<sup>19</sup>

#### 1.12 Pengertian Kendaraan Bermotor (Mobil, Sepeda Motor, Dll)

Kendaraan bermotor, baik itu yang beroda dua atau lebih adalah alat transportasi bagi manusia yang bernilai ekonomis dan memiliki kegunaan, sehingga kendaraan bermotor dijadikan sebagai bagian dari harta benda. Menyadari bahwa kendaraan bermotor merupakan bagian dari harta kekayaan yang bernilai mewah, maka setiap orang ingin memilikinya, baik itu dengan cara membeli, mengangsur atau kredit, mencuri, merampas, menadah dan sebagainya. Memiliki kendaraan bermotor dengan cara mencuri memang tidak mengeluarkan biaya / uang, dan lebih mudah, cepat memperolehnya serta mempunyai resiko yang kecil untuk diketahui oleh pihak yang berwajib, oleh karena biasanya oleh si pelaku identitas pemilik kendaraan bermotor tersebut secepatnya dirubah.

Demikian juga memiliki kendaraan bermotor dengan cara menadah dengan mengeluarkan biaya yang begitu kecil dan tidak sebagaimana mestinya, dan komponen-komponen kendaraan tersebut dapat diperjualbelikan kepada orang lain dengan suatu keuntungan yang cukup besar.

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 26

### 1.13 Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasai suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>20</sup>

Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>21</sup>

#### 1.13.1 Jenis Penelitian

Menggunakan pendekatan normatif, tinjauan yuridis normatif yang dengan melakukan identifikasi terhadap isu-isu hukum yang sedang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan-penerapan hukum dalam masyarakat, mengkaji pendapat para ahli-ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademis keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum.

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 38

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 1

### 1.13.2 Sumber Data

#### 1. Sumber bahan hukum primer

Yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu Polres Sidoarjo.

#### 2. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa Undang-Undang yang mengatur atau berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Dalam permasalahan ini yang digunakan adalah Pasal 480 KUHP tentang Penadahan atau disebut Pemudahan Dalam Tindak Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa referensi dari para ahli yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan para ahli dalam bidang pidana untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa jurnal hukum.

### 1.13.3 Metode Pengumpulan Data

Metode ini bisa dibagi menjadi dua yaitu :

1. Primer yaitu berupa data yang diambil dengan cara observasi, wawancara dengan anggota Kepolisian Polres Sidoarjo atau kuisioner.
2. Sekunder yaitu berupa data yang diambil dengan cara studi pustaka yang dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum melalui alat bantu catatan untuk dapat digunakan sebagai landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli sehingga dapat diperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan resmi oleh pihak yang berkompeten dalam bidang Penadahan.

### 1.13.4 Metode Pengolahan Data atau Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu gambaran yang terjadi dalam suatu masalah dan cara penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan, pendapat para ahli-ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan Penadahan Mobil yaitu Pasal 480 KUHP.

#### 1.13.5 Sistematika Penulisan

Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Mobil” ini terbagi dalam empat bab, dan untuk lebih memudahkan maka penulis akan memberikan gambaran umum dari tiap-tiap babnya.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang bersifat uraian pokok-pokok dari penulisan skripsi atau tulisan yang harus dikembangkan. Di dalam bab pertama ini mengulas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab Kedua pada skripsi ini mengulas tentang tinjauan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan mobil dari hasil pencurian. Dalam bab ini terdiri dari 2 sub bab. Sub bab pertama mengulas tentang modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penadahan mobil. Sub bab kedua mengulas tentang tinjauan hukum bagi si penadah mobil hasil pencurian..

Bab ketiga membahas tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan mobil dari hasil pencurian. Dalam bab ini terdiri dari 2 sub bab. Sub bab pertama mengulas tentang faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan pelaku tindak pidana penadahan mobil dari hasil pencurian. Sub bab kedua mengulas tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penadahan mobil dari hasil pencurian.

Bab keempat merupakan bab penutup yang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang telah dipaparkan pada skripsi ini serta berisi saran dari penulisan yang nantinya mungkin dapat berguna bagi penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan penadahan mobi dari hasil pencurian.